

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari Unit Kerja Eselon dan perubahan struktur organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Estu Retno Yulianti, S.E. NIP. 19810725 201502 2 001 Calon Auditor	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat
2.	Ivana Suprpto, S.E. NIP. 19820725 201502 2 001 Analisis Monitoring dan Evaluasi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Yan Ari Wibowo, A.Md. NIP. 19900107 201502 1 001 Pranata Barang dan Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum dan Keuangan
4.	Resa Anggriani, S.Psi NIP. 19860709 201012 2 001 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

5.	Fenita Enggraini, S.T. NIP. 19851202 201502 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Tino Yuka Aldila, S.T. NIP. 19870702 201502 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Reza Alwan Affandi, S.E. NIP. 19910525 201402 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
8.	Eva Nurdinna Agustini, S.T. NIP. 19800816 201012 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Lulu Haryani, S.T. NIP. 19870423 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Doddy Pascal, S.T. NIP. 19840223 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
11.	Vialita Octaviani, S.Mb. NIP. 19911029 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Anatasia, S.Psi., M.M. NIP. 19881217 201012 2 001 Kepala Seksi Tata Kelola Pengelola Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
13.	Juniarty Erika Magdalena Saragi, S.Pd. NIP. 19890623 201502 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
14.	Manshur Riadli, S.Pd. NIP. 19871019 201502 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
15.	Ali Masrochan, S.T.P. NIP. 19870926 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I

16.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, S.E. NIP. 19821101 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sulawesi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sangah Wilayah II
17.	Mita Astari Yatnanti, S.E. NIP. 19850924 201012 2 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Januari 2018

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**

ttd

SALUSRA WIDYA